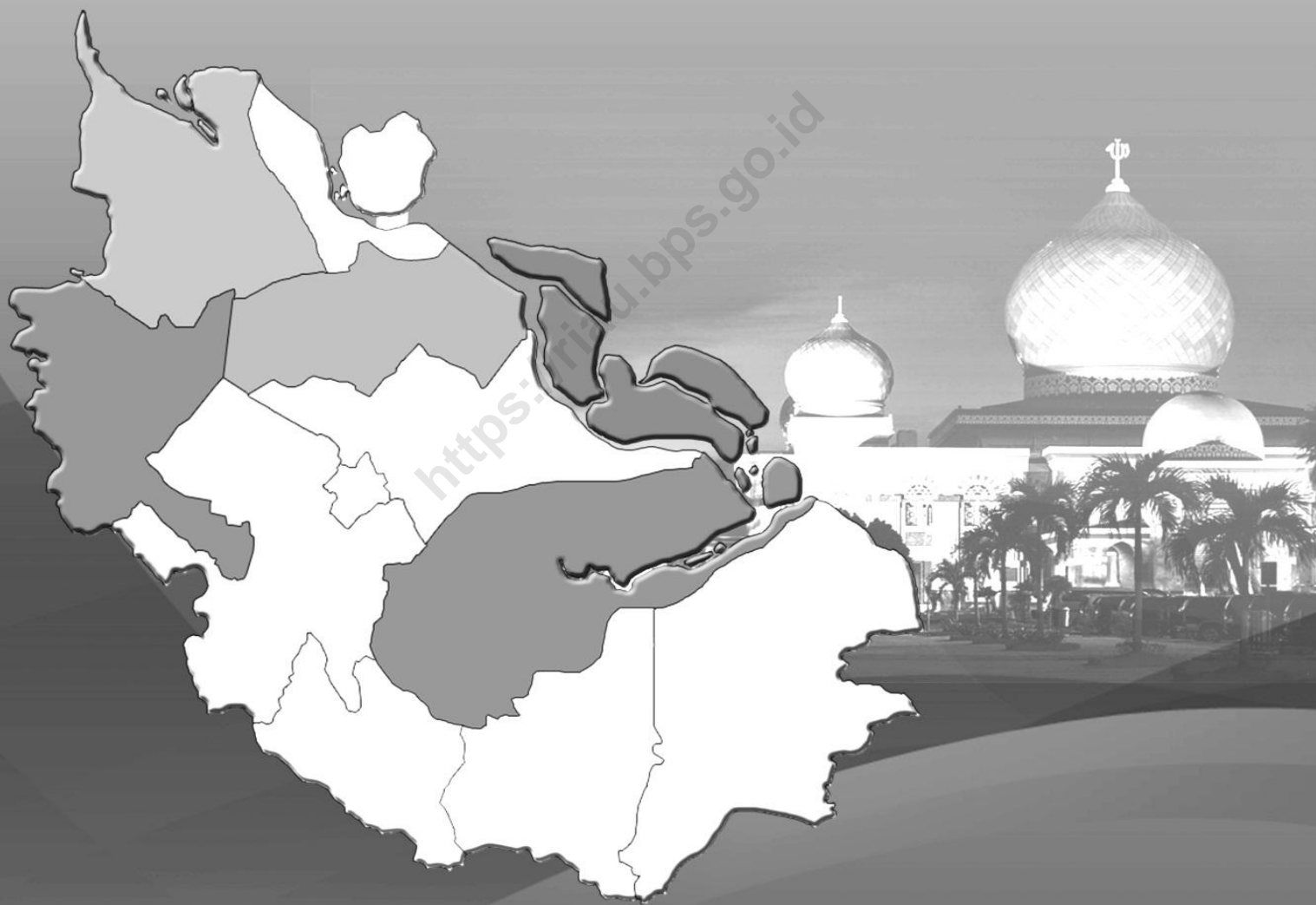


**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU  
MENURUT LAPANGAN USAHA  
2013 - 2017**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU  
MENURUT LAPANGAN USAHA  
2013 - 2017**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA  
2013 - 2017**

ISSN : 2406-842x  
Nomor Publikasi : 14550.1803  
Katalog BPS Provinsi Riau : 9302008.14  
Ukuran Buku : 21 cm X 28 cm  
Jumlah Halaman : xiv+86 halaman

Naskah  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh  
© Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan  
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**Tim Penyusun**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA  
2013 - 2017**

**Pengarah**

Ir. Aden Gultom, M.M.

**Penanggung Jawab Umum**

Urip Widiyantoro, S.Si.

**Editor**

Urip Widiyantoro, S.Si.

**Penulis dan Pengolah Data**

Rahmi Renzya, S.S.T.

**Desain Kulit**

Ferdian Fadly, S.S.T.

<https://riau.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

**P**ublikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha 2013-2017 merupakan publikasi tahunan yang menampilkan kondisi ekonomi tahun terakhir, yakni periode 2013-2017. Publikasi ini merupakan hasil rekapitulasi dari pendapatan regional masing-masing kabupaten/kota. Perkembangan ekonomi di setiap kabupaten/kota penting untuk dicermati secara spasial agar memudahkan para pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan.

Pola perkembangan ekonomi tersebut dapat berbeda antarkabupaten/kota, karena sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia serta teknologi yang tersedia di wilayah tersebut. Ketersediaan faktor-faktor produksi akan menghasilkan output/produksi yang beragam dan pada gilirannya akan membentuk struktur ekonomi daerah. Struktur dan pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran atas kemajuan pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Selain indikator tersebut, PDRB per kapita juga disajikan dalam publikasi ini.

Saran dan masukan dari pengguna data sangat diharapkan demi meningkatnya kualitas publikasi ini di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, September 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Riau,



**Aden Gultom**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL ANALISIS	ix
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Pengertian PDRB .....	3
1.3 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto .....	4
1.4 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto .....	4
BAB II. URAIAN LAPANGAN USAHA .....	11
2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan .....	13
2.2 Pertambangan dan Penggalian .....	19
2.3 Industri Pengolahan .....	21
2.4 Pengadaan Listrik dan Gas .....	28
2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang .....	30
2.6 Konstruksi .....	31
2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor .....	33
2.8 Transportasi dan Pergudangan.....	35
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	38
2.10 Informasi dan Komunikasi.....	40
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi.....	42
2.12 Real Estat.....	50
2.13 Jasa Perusahaan.....	51
2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	53
2.15 Jasa Pendidikan.....	53
2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	54
2.17 Jasa Lainnya.....	55



BAB III. PERKEMBANGAN PDRB ANTARDAERAH .....	59
A. PDRB dengan Migas .....	61
3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota .....	61
3.2 Kontribusi PDRB dengan Migas Kabupaten/Kota .....	62
3.3 PDRB Per Kapita dengan Migas Kabupaten/Kota .....	65
B. PDRB tanpa Migas .....	66
3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota .....	66
3.5 Kontribusi PDRB tanpa Migas Kabupaten/Kota .....	67
3.6 PDRB Per Kapita tanpa Migas Kabupaten/Kota .....	69
3.7 Struktur Ekonomi Tiga Lapangan Usaha Utama tanpa Migas Kabupaten/Kota.....	70
LAMPIRAN TABEL-TABEL POKOK .....	73-86

## DAFTAR TABEL ANALISIS

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB.....	8
1.2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010.....	9
3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2015-2017 (%) .....	62
3.2. Kontribusi PDRB dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2015-2017 (%) ...	63
3.3. Struktur Ekonomi dengan Migas Yang Terbesar Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2017 (%) .....	64
3.4. PDRB Per Kapita dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2015-2017 (Juta Rp) .....	66
3.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2015-2017 (%) .....	67
3.6. Kontribusi PDRB tanpa Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2015-2017 (%) .....	68
3.7. PDRB Per Kapita tanpa Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2015-2017 (Juta Rp)	69
3.8. Struktur Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota Menurut Kegiatan Ekonomi Primer, Sekunder, dan Tersier, 2015-2017 (%) .....	71



## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	65
2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	65
3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	66
4	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	66
5	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	67
6	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	67
7	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	68
8	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	68
9	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	69
10	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	69
11	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	70
12	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	70
13	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah).....	71
14	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	71
15	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	72

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	72
17 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	73
18 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	73
19 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	74
20 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	74
21 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	75
22 Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	75
23 Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	76
24 Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	76

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2017, perekonomian Riau dengan minyak dan gas bumi (migas) tumbuh sebesar 2,71 persen, lebih baik dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,23 persen. Hal ini mempengaruhi perkembangan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Riau yang cenderung mengalami percepatan di tahun 2017. Kota Pekanbaru tercatat sebagai wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dengan migas tertinggi di Provinsi Riau, yakni mencapai 6,10 persen, diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu dan Indragiri Hilir yang masing-masing tumbuh sebesar 5,56 persen dan 4,70 persen. Apabila pertumbuhan ekonomi dihitung tanpa migas, kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Rokan Hulu masing-masing sebesar 6,29 persen; 6,10 persen; dan 5,70 persen.

Kabupaten/kota yang sebagian besar perekonomiannya masih ditopang oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, masih tertahan dalam upaya percepatan perekonomiannya. Bahkan, Kabupaten Bengkalis masih mengalami kontraksi pertumbuhan ekonominya di tahun 2017, yakni sebesar -1,77 persen. Begitu pula dengan Kabupaten Siak, Kampar, dan Rokan Hilir yang angka pertumbuhan ekonominya kurang mengesankan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, walaupun membaik dibanding tahun sebelumnya.

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Riau yang dihitung dengan migas, yaitu sebesar 18,70 persen, diikuti oleh Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kampar masing-masing kontribusinya sebesar 14,25 persen; 10,48 persen; dan 10,06 persen. Apabila dihitung tanpa migas, Kota Pekanbaru menempati urutan teratas dalam pembentukan ekonomi Riau sebesar 18,35 persen, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Siak masing-masing sebesar 11,06 persen; 10,45 persen; dan 10,24 persen.

PDRB per kapita Riau dengan migas selama tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, PDRB per kapita Riau dengan migas mencapai Rp105,99 juta. Begitu pula dengan PDRB per kapita kabupaten/kota yang cenderung mengalami kenaikan selama kurun waktu yang sama, kecuali Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Rokan Hilir yang mengalami penurunan. Sementara itu, PDRB per kapita Riau tanpa migas pada tahun 2017 mencapai Rp82,43 juta, naik dibanding dua tahun sebelumnya. Hal ini diikuti oleh seluruh kabupaten/kota yang juga mengalami kenaikan dalam PDRB per kapitanya selama tahun 2015-2017.



# Pendahuluan

## Pendahuluan

- 
- 1.1 Latar Belakang**
  - 1.2 Pengertian PDRB**
  - 1.3 Kegunaan PDRB**
  - 1.4 Perubahan Tahun Dasar PDRB**
- 

<https://riau.bps.go.id>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

**P**erencanaan pembangunan ekonomi memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan

masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta.

### 1.2 Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan

PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

### **1.3 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto**

Data pendapatan regional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

### **1.4 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto**

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan

perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan PDRB untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

#### **Apa yang Dimaksud SNA2008?**

SNA2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang

disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDB atau PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

#### **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain:

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara nasional maupun internasional.

#### **Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?**

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak

- pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan mengubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
  - Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

### Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh

terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;

- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>1</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB dan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index* /PPI);
- Tersedianya kerangka kerja *Supply and Use Tables* (SUT) yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

### Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB dan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

<sup>1</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- Konsep dan cakupan: Perlakuan *Work-in Progress* (WIP) pada *Cultivated Biological Resources* (CBR):

Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai sapi perah yang belum menghasilkan susu (laktasi), nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- Metodologi: Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM).

- Valuasi: Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*).

Merupakan harga keekonomian barang dan jasa di tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB,

sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- Klasifikasi: Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB**

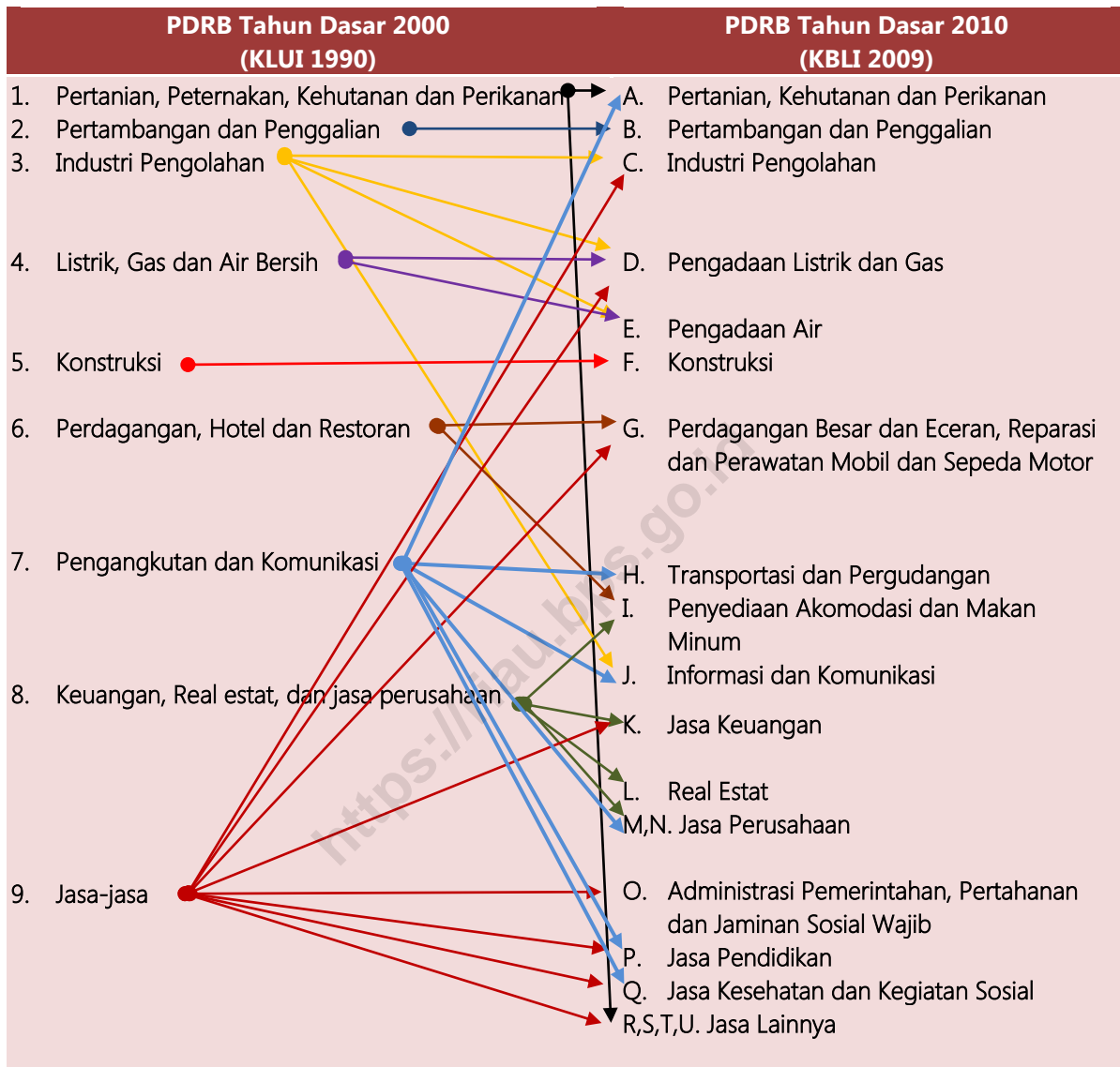
Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC)	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

### Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun

#### Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990), sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010**







# Uraian Sektoral

## Uraian Sektoral

---

- 2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**
  - 2.2 Pertambangan dan Penggalian**
  - 2.3 Industri Pengolahan**
  - 2.4 Pengadaan Listrik dan Gas**
  - 2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang**
  - 2.6 Konstruksi**
  - 2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**
  - 2.8 Transportasi dan Pergudangan**
  - 2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**
  - 2.10 Informasi dan Komunikasi**
  - 2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi**
  - 2.12 Real Estat**
  - 2.13 Jasa Perusahaan**
  - 2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**
  - 2.15 Jasa Pendidikan**
  - 2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**
  - 2.17 Jasa Lainnya**
-



## BAB II

### URAIAN LAPANGAN USAHA

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

#### **2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Usaha ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

##### **2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian**

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan,

peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

##### **2.1.1.1 Tanaman Pangan**

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan dari kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dan lain-lain), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dan lain-lain). Keseluruhan komoditas tersebut masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Bidang Statistik Produksi

BPS Provinsi Riau dan Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen dan Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

#### **2.1.1.2 Tanaman Hortikultura**

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan

hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Riau dan Subdit Statistik Hortikultura BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH).

#### **2.1.1.3 Tanaman Perkebunan**

Tanaman perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan

mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Dinas Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Riau dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

#### 2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dan sebagainya.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar

petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

#### 2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran tumbuhan/satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar

dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari *furskin*, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian tumbuhan/satwa liar, baik yang hidup di darat maupun laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Bidang Neraca Wilayah dan Analisis BPS Provinsi Riau. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output

diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar serta penangkaran tumbuhan/satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan tumbuhan/satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

### 2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang

dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, Subdit Statistik Kehutanan BPS, dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

### 2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, *crustacea*, *mollusca*, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas



dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau serta Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditas pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu,

komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources* (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress* (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang

menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

## 2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya.

### 2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori pertambangan minyak, gas (migas) dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga

mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM. Data harga/indikator harga juga diperoleh dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; data struktur biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan dan Penggalian, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, sedangkan harga gas bumi menggunakan harga pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP

Gas dan Panas bumi.

## 2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan

dengan cara yang sama seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara diperoleh dari Dinas ESDM Provinsi Riau dan Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM; Sedangkan data-data lain yang dibutuhkan diperoleh dari Statistik Pertambangan Non Migas BPS, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

## 2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Subkategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak

mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

#### **2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya**

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik Penggalian Tahunan. Sementara itu PDRB

triwulan diestimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi (DNP) BPS.

### **2.3 Industri Pengolahan**

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maktun atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari

pihak lain atas dasar kontrak.

### **2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi**

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti pengilangan minyak dan gas bumi, yang meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, *gasoline*, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk di sini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19.

### **2.3.2 Industri Makanan dan Minuman**

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu industri makanan dan industri minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang

tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

### **2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau**

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, *snuff*, *chewing* dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (*snuff*), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12.

### **2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi**

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu industri tekstil dan industri pakaian jadi.

Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, serta pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

### **2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki**

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai,

pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15.

### **2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman**

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu,

rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16.

### **2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam**

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu industri kertas dan barang dari kertas, dan industri pencetakan dan reproduksi media rekaman. Industri kertas dan barang dari kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran, dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk

memindahkan suatu *image* dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

### **2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional**

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu industri kimia dan industri farmasi dan obat tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan nonorganik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri farmasi dan obat tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preperat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preperat darah, obat-obatan jadi, preperat diagnostik, preperat medis, obat tradisional atau jamu, dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

### **2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik**

Subkategori ini mencakup

pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, dan pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

### **2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam**

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen, dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk di sini. KBLI 2009: kode 23.

### **2.3.11 Industri Logam Dasar**

Subkategori ini mencakup

kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bongkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: hasil industri besi dan baja dasar, hasil penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 24.

### **2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik**

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, *container*/wadah, dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan, dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26, dan 27.

### **2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan**

Kegiatan yang tercakup dalam



subkategori industri mesin dan perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian, dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28.

#### **2.3.14 Industri Alat Angkutan**

Subkategori ini mencakup industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara, dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan

aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

#### **2.3.15 Industri Furnitur**

Industri furnitur mencakup pembuatan mebel dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen, dan keramik. Pengolahan pembuatan mebel adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebel cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31.

#### **2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan**

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses

produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan, dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data industri pengolahan batubara dan pengilangan minyak dan gas bumi terdiri dari data produksi pengilangan migas diperoleh dari PT Pertamina RO 2 Dumai dan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Data produksi/indikator produksi industri batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas Kementerian ESDM, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran BPS, sedangkan indikator harga untuk industri batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi

Statistik Pertambangan Migas BPS.

Sumber data industri makanan dan minuman sampai dengan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan terdiri dari produksi/indikator produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Data struktur biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK BPS ditambah dengan berbagai survei khusus yang dilakukan DNP BPS.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan industri pengolahan migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing

tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk industri batubara sampai dengan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Dalam penghitungan NTB Industri Pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

## **2.4 Pengadaan Listrik dan Gas**

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin, dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol, dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara.

### **2.4.1 Ketenagalistrikan**

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman, dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta

(perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan adalah data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan, baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT PLN Wilayah Riau dan Kepri

setiap triwulan dan juga Statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

#### **2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es**

Subkategori ini menghasilkan gas alam, gas buatan, uap/air panas, udara dingin, dan produksi es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi, dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan pengadaan uap/air panas, udara dingin, dan produksi es

mencakup kegiatan produksi, pengumpulan, dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT PGN Area Pekanbaru setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari

laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

## 2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/ lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan nilai tambah bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun

terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan, dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan sampah/limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan, dan pembersihan sampah dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber data produksi adalah Statistik Air Bersih dari Subdit Statistik Pertambangan dan Energi BPS, APBD (Pemerintah Provinsi Riau), data output sampah diperoleh dari Subdit Statistik IBS BPS, data harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS, serta data struktur biaya diperoleh dari Survei Tahunan Air Bersih BPS.

## 2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek, dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain konstruksi gedung tempat tinggal; konstruksi gedung bukan tempat tinggal; konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; konstruksi

bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai

ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan output harga konstan, output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara diperoleh dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan konsumsi antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Riau, produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas Kementerian ESDM, realisasi pengadaan semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar BPS. Indeks konstruksi dari Subdirektorat Statistik Konstruksi BPS.



## 2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, dan pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi

ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

### 2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen



komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

### 2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang atau "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh

dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri dan luar wilayah. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di *deflate* menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

Sumber data yang digunakan dalam kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah data output barang dari komoditi flow pertanian dan industri domestic serta impor barang dari Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provins Riau, IHK dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau, dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS, seperti SKSJ dan SKNP.

## 2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

### 2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api

Indonesia (PT KAI).

### 2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter/sewa* kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkut). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Data untuk penghitungan struktur output dan

rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pengangkutan darat dan hasil Sensus Ekonomi. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### 2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara

rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Pekanbaru dan Dumai, serta Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari survei terhadap perusahaan angkutan laut, serta IHK jasa angkutan laut dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba dari perusahaan pengangkutan laut dan hasil Sensus Ekonomi.

### 2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga

berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT ASDP Indonesia.

### 2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Provinsi Riau.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura II (Pekanbaru) dan Dinas Perhubungan

Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan maskapai lainnya, serta IHK jasa angkutan udara dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

#### **2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir**

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi yaitu dengan membagi nilai output atas dasar

berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti PT Angkasa Pura II (Pekanbaru), PT Pelabuhan Indonesia Pekanbaru dan Dumai, dan beberapa perusahaan lainnya. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

#### **2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

### 2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator

harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata BPS.

### 2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk

menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi subkategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

## 2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk

mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, *leaflet*, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti *cd-rom* buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, *video tape* atau *disk* untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti *editing*, *cutting*, *dubbing* film dan lain-lain,



pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses

pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga



konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, perusahaan di bidang televisi dan teknologi informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT Bakrie Telecom; dan PT Smartfren Telecom. Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

## 2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau

pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

### 2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, *baitul maal wantanwil*, dan jasa perantara moneter

lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan jasa moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa Jasa

Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Kantor Pusat Bank Indonesia.

## **2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun**

Asuransi dan Dana Pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

### **Asuransi dan Reasuransi**

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung risiko-risiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi

dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **Dana Pensiun**

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan.

Metode estimasi yang digunakan

dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya**

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian,

pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

### **Pegadaian**

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan

keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari OJK Provinsi Riau, PT Pegadaian, dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan *leasing* lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari OJK Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **Modal Ventura**

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga

berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari OJK Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan**

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan

penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

### **Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)**

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia Perwakilan Riau yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI Perwakilan Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **Manager Investasi**

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi

diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **Lembaga Kliring dan Penjaminan**

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh

dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian**

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

(PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **Wali Amanat**

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **Jasa Penukaran Mata Uang**

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi**

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang



memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik bertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

## 2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan

persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m<sup>2</sup>. NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh

berdasarkan hasil Susenas dan Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi terkait. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ) BPS.

### **2.13 Jasa Perusahaan**

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N

antara lain jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

#### **Jasa Hukum**

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

#### **Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa**

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

#### **Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya**

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa

konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan *drafting*, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

### **Periklanan**

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

### **Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil**

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

### **Jasa Penyaluran Tenaga Kerja**

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

### **Jasa Kebersihan Umum Bangunan**

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Riau. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang

Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

#### **2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari realisasi APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (K1, K2, K3), BPS; realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional XII Pekanbaru.

#### **2.15 Jasa Pendidikan**

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang

terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan pendekatan produksi. Untuk NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari realisasi APBN/APBD; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Agama; Dinas Pendidikan Provinsi Riau; berbagai survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

## 2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup jasa rumah sakit; jasa klinik; jasa rumah sakit lainnya; praktik dokter; jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis; jasa pelayanan kesehatan tradisional; jasa pelayanan penunjang kesehatan; jasa angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*); jasa kesehatan hewan; jasa kegiatan sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi,

sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); berbagai survei khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS; dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

### **2.17 Jasa Lainnya**

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

### **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi**

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang

sesuai.

Sumber data produksi jasa kesenian, hiburan dan rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Balai Taman Nasional, dan data penunjang intern BPS (ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan survei-survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

#### **Kegiatan Jasa Lainnya**

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan

menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk, Susenas, Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Riau, dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau).

#### **Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan**

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, sopir, dan sejenisnya), dan Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan (di dalamnya termasuk kegiatan pertanian, industry pengolahan, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/jasa pekerja domestik

(pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, sopir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga/SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu Susenas, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk, Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Riau (Publikasi Statistik Air Bersih), dan

survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran BPS.

### **Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya**

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, badan regional dan lain-lain, termasuk *The Internasional Moneter Fund (IMF)*, *The World Bank (WB)*, *The World Health Organization (WHO)*, *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)*, dan lain-lain.





# Perkembangan PDRB Antardaerah

- 
- 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas Kabupaten/Kota**
  - 3.2 Kontribusi PDRB Dengan Migas Kabupaten/Kota**
  - 3.3 PDRB Per Kapita Dengan Migas Kabupaten/Kota**
  - 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten/Kota**
  - 3.5 Kontribusi PDRB Tanpa Migas Kabupaten/Kota**
  - 3.6 PDRB Per Kapita Tanpa Migas Kabupaten/Kota**
  - 3.7 Struktur Ekonomi Tiga Lapangan Usaha Utama Tanpa Migas Kabupaten/Kota**
-



## BAB III

### PERKEMBANGAN PDRB ANTARDAERAH

Pada bab ini memaparkan gambaran umum tentang kondisi perekonomian kabupaten/kota se-Provinsi Riau baik dengan migas maupun tanpa migas selama periode 2015-2017. Melalui ulasan ringkas ini dapat menggambarkan perekonomian kabupaten/kota se-Provinsi Riau dalam menggali potensi sumber daya ekonomi masing-masing daerah. Indikator-indikator makro seperti laju pertumbuhan, kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam perekonomian, dan PDRB per kapita diharapkan dapat membantu memudahkan dalam perencanaan pembangunan.

#### A. PDRB dengan Migas

##### 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten/Kota

Belum pulihnya krisis global yang melanda masyarakat dunia, seiring dengan merosotnya beberapa harga komoditas energi di pasar internasional berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, termasuk juga Provinsi Riau. Perekonomian Riau sangat dipengaruhi oleh perekonomian global, terutama

sektor minyak dan gas bumi (migas) dan kelapa sawit. Bergejolaknya harga minyak mentah dan *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional akan berimbas pada kinerja ekonomi Riau.

Pada tahun 2015, anjloknya harga minyak mentah dunia sekitar 33 USD/barel dan diperparah dengan kondisi kabut asap yang melanda Riau dan sebagian besar Pulau Sumatera, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Riau hanya tumbuh sebesar 0,22 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai membaik pada tahun 2017, ekonomi Riau juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan membaiknya harga beberapa komoditas unggulan Riau, seperti CPO dan berkurangnya bencana asap secara drastis di Riau, menyebabkan ekonomi Riau tumbuh sebesar 2,71 persen. Kondisi ini juga mempengaruhi perkembangan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau yang cenderung mengalami percepatan di tahun 2017, walaupun masih ada

kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2015-2017 (%)**

Kabupaten/Kota	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	-2,14	3,88	4,43
2. Indragiri Hulu	-2,94	3,68	4,02
3. Indragiri Hilir	2,05	4,84	4,70
4. Pelalawan	2,46	2,96	4,10
5. Siak	-0,21	0,35	0,94
6. Kampar	1,09	2,80	3,01
7. Rokan Hulu	1,98	4,73	5,56
8. Bengkalis	-2,74	-2,44	-1,77
9. Rokan Hilir	0,52	2,08	2,03
10. Kep. Meranti	2,85	3,20	3,32
11. Pekanbaru	5,57	5,95	6,10
12. Dumai	2,03	4,18	4,45
<b>RIAU</b>	<b>0,22</b>	<b>2,23</b>	<b>2,71</b>

Keterangan: \*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang memiliki kontribusi migas cukup besar dalam PDRB mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis yang hampir 70 persen perekonomiannya bergantung pada migas, pada tahun 2017 masih mengalami kontraksi pertumbuhan

sebesar -1,77 persen. Hal ini diakibatkan produksi minyak yang terus menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan Kabupaten Siak dan Kampar perekonomiannya tumbuh masing-masing sebesar 0,94 persen dan 3,01 persen, membaik dibanding tahun sebelumnya. Sementara perekonomian Kabupaten Rokan Hilir mengalami sedikit perlambatan di tahun 2017, yakni sebesar 2,03 persen.

### 3.2 Kontribusi PDRB dengan Migas Kabupaten/Kota

Pada tabel 3.2 dapat dilihat kontribusi PDRB kabupaten/kota dengan migas se-Provinsi Riau selama periode 2015-2017. Kontribusi ekonomi kabupaten/kota yang memiliki sumber daya migas sangat berpengaruh terhadap perekonomian Riau. Pada ulasan sebelumnya, sektor migas sangat mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan perekonomian suatu wilayah di Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan betapa besarnya ketergantungan perekonomian kabupaten/kota yang memiliki kontribusi migas yang sangat dominan, artinya dengan peningkatan produksi migas maka kemampuan kabupaten/kota tersebut menjadi lebih

dominan terhadap penciptaan barang dan jasa dalam perekonomiannya.

Perekonomian Riau sepertiganya bergantung dari minyak mentah dengan sumur minyak yang tersebar di beberapa kabupaten. Salah satu kabupaten yang paling signifikan dalam menyumbang perekonomian Riau dari minyak adalah Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2017, kontribusi Kabupaten Bengkalis dalam membentuk PDRB Riau sebesar 18,70 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Siak, Rokan Hilir, dan Kampar yang masing-masing berkontribusi sebesar 11,19 persen; 10,48 persen; dan 10,06 persen.

Walaupun Kota Pekanbaru bukan merupakan kota penghasil minyak, namun kontribusinya dalam perekonomian Riau cukup signifikan, yaitu sebesar 14,25 persen pada tahun 2017. Besarnya kontribusi Kota Pekanbaru didukung oleh kekuatan aktivitas perekonomian di luar migas, yakni lapangan usaha perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Selanjutnya kabupaten yang juga berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian Riau tanpa migas selain Kota Pekanbaru adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Namun demikian, ada

beberapa kabupaten yang memiliki migas ternyata dalam memberi kontribusi terhadap ekonomi Riau masih relatif kecil. Hal ini karena produksi migas yang dimiliki oleh kabupaten tersebut juga relatif rendah terhadap total produksi migas Riau.

**Tabel 3.2**  
**Kontribusi PDRB Dengan Migas**  
**Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau,**  
**2015-2017 (%)**

Kabupaten/Kota	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	3,87	4,03	4,15
2. Indragiri Hulu	5,32	5,42	5,45
3. Indragiri Hilir	7,96	8,40	8,59
4. Pelalawan	5,87	6,03	6,17
5. Siak	11,87	11,56	11,19
6. Kampar	10,19	10,20	10,06
7. Rokan Hulu	4,14	4,27	4,36
8. Bengkalis	20,83	19,37	18,70
9. Rokan Hilir	10,86	10,74	10,48
10. Kep. Meranti	2,33	2,35	2,35
11. Pekanbaru	12,86	13,53	14,25
12. Dumai	3,91	4,10	4,26
<b>RIAU</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: \*) Angka sementara  
\*\*) Angka sangat sementara

Pada tahun 2017, Kabupaten Pelalawan memberikan kontribusi sebesar 6,17 persen, Indragiri Hulu 5,45 persen, Rokan Hulu 4,36 persen. Sementara Kabupaten Kuantan Singingi

dan Kepulauan Meranti hanya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 4,15 persen dan 2,35 persen. Kota Dumai, walaupun tidak mempunyai sumur minyak, namun terdapat kilang minyak yang merupakan salah satu dari enam kilang minyak terbesar di Indonesia. Kota Dumai mampu memberikan kontribusi sebesar 4,26 persen terhadap PDRB Riau.

Untuk mengetahui potensi atau struktur perekonomian yang dimiliki

setiap kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB.

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau masih mengandalkan lapangan usaha pertanian dan pertambangan untuk menggerakkan roda perekonomian, kecuali Kabupaten Pelalawan, Siak, Kota Pekanbaru, dan Dumai yang sudah mulai beralih ke kegiatan ekonomi sekunder.

**Tabel 3.3**  
**Struktur Ekonomi dengan Migas yang Terbesar**  
**Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau**  
**Tahun 2017(%)**

Kabupaten/Kota	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	Pertanian 49,38	Industri 27,85	Konstruksi 7,87
2. Indragiri Hulu	Pertanian 28,83	Industri 28,50	Konstruksi 14,41
3. Indragiri Hilir	Pertanian 48,13	Industri 23,60	Perdagangan 15,45
4. Pelalawan	Industri 48,88	Pertanian 39,24	Perdagangan 3,07
5. Siak	Industri 35,76	Pertambangan 34,44	Pertanian 19,67
6. Kampar	Pertambangan 34,47	Pertanian 27,37	Industri 23,03
7. Rokan Hulu	Pertanian 51,74	Industri 25,62	Perdagangan 5,69
8. Bengkalis	Pertambangan 66,74	Industri 12,90	Pertanian 9,01
9. Rokan Hilir	Pertambangan 45,14	Pertanian 30,63	Industri 17,33
10. Kep. Meranti	Pertanian 36,96	Industri 24,82	Pertambangan 18,15
11. Pekanbaru	Perdagangan 30,40	Konstruksi 29,71	Industri 19,85
12. Dumai	Industri 54,75	Perdagangan 17,33	Konstruksi 11,53
<b>Riau</b>	<b>Pertambangan 25,93</b>	<b>Industri 25,31</b>	<b>Pertanian 23,63</b>

Kabupaten yang masih ditopang oleh lapangan usaha pertanian yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan sangat dominan di Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar 66,74 persen. Secara keseluruhan, dengan memasukkan lapangan usaha migas dalam pembentukan PDRB, Provinsi Riau masih mengandalkan kegiatan ekonomi primer. Kontribusi lapangan usaha pertanian dan pertambangan terhadap perekonomian Riau mencapai 49,56 persen.

### **3.3 PDRB Per Kapita dengan Migas Kabupaten/Kota**

Tabel 3.4 menunjukkan perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang cenderung meningkat selama periode 2015-2017. Perkembangan ini mencerminkan seberapa tinggi tingkat (level) kemakmuran yang telah dicapai oleh penduduk kabupaten/kota pada periode tersebut. Perkembangan PDRB per kapita dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata tingkat

kemakmuran masyarakatnya mengalami peningkatan atau sebaliknya.

PDRB per kapita Provinsi Riau dengan migas atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp 102,89 juta di tahun 2015 menjadi Rp 104,95 juta pada tahun 2016, kemudian naik menjadi 105,99 juta pada tahun 2017.

Sementara itu, jika dilihat dari PDRB per kapita secara riil (atas dasar harga konstan) mengalami sedikit penurunan, dari Rp 70,77 juta pada tahun 2015 turun menjadi Rp 70,60 juta pada tahun 2016 kemudian naik menjadi Rp 70,81 juta pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan perubahan harga tidak diikuti dengan peningkatan volume. Sementara PDRB per kapita kabupaten/kota sebagian besar memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat selama periode 2015-2017.



**Tabel 3.4**  
**PDRB Per Kapita dengan Migas**  
**Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau,**  
**2015-2017 (Juta Rp)**

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2015	2016*	2017**	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kuantan Singingi	80,17	86,56	91,89	63,31	65,01	67,19
2. Indragiri Hulu	84,47	88,65	90,96	62,99	64,02	65,31
3. Indragiri Hilir	73,61	80,48	84,57	53,89	55,76	57,64
4. Pelalawan	96,16	98,60	99,96	75,00	73,43	72,73
5. Siak	175,20	174,25	171,06	116,55	113,80	111,83
6. Kampar	83,59	85,73	86,01	58,40	58,58	58,92
7. Rokan Hulu	45,43	47,25	48,41	35,12	35,34	35,86
8. Bengkalis	249,10	239,84	237,95	151,98	146,20	141,72
9. Rokan Hilir	109,66	110,77	109,69	69,30	68,86	68,46
10. Kep. Meranti	83,67	88,08	91,28	61,27	62,87	64,55
11. Pekanbaru	80,59	86,78	92,88	55,50	57,34	59,36
12. Dumai	89,01	95,84	101,82	71,83	73,31	75,10
<b>Riau</b>	<b>102,89</b>	<b>104,95</b>	<b>105,99</b>	<b>70,77</b>	<b>70,60</b>	<b>70,81</b>

Keterangan: \*) Angka sementara

\*\*\*) Angka sangat sementara

Sebaliknya, kabupaten yang lapangan usaha migasnya cukup besar justru mengalami tren yang menurun. Kabupaten Bengkalis dan Siak pada tahun 2016 PDRB per kapitanya masing-masing sebesar Rp 239,84 juta dan Rp 174,25 juta, turun masing-masing menjadi Rp 237,95 juta dan Rp 171,06 juta pada tahun 2017.

## B. PDRB tanpa Migas

### 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas Kabupaten/Kota

Apabila dilihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas kabupaten/kota di Provinsi Riau, akan nampak perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan dengan migas. Kota Dumai yang perekonomiannya didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan mencatat laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya yakni mencapai 6,29 persen pada tahun 2017. Kota Pekanbaru, yang merupakan representasi dari perekonomian Provinsi Riau karena

posisinya sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan, mencatat laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi kedua yakni sebesar 6,10 persen pada tahun 2017. Tingginya pertumbuhan ekonomi kedua daerah perkotaan tersebut lebih ditopang oleh struktur perekonomian yang didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

**Tabel 3.5**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas**  
**Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau,**  
**2015-2017 (%)**

Kabupaten/Kota	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	-2,14	3,88	4,43
2. Indragiri Hulu	-3,00	3,74	4,18
3. Indragiri Hilir	2,05	4,84	4,70
4. Pelalawan	2,51	3,01	4,21
5. Siak	2,59	1,98	3,15
6. Kampar	1,54	3,64	5,16
7. Rokan Hulu	2,07	4,84	5,70
8. Bengkalis	3,26	3,28	2,80
9. Rokan Hilir	2,45	3,53	3,96
10. Kep. Meranti	4,51	4,55	4,60
11. Pekanbaru	5,57	5,95	6,10
12. Dumai	3,71	6,19	6,29
<b>RIAU</b>	<b>2,03</b>	<b>3,74</b>	<b>4,57</b>

Keterangan: \*) Angka sementara

\*\*\*) Angka sangat sementara

Kabupaten lainnya yang juga memiliki pertumbuhan ekonomi cukup

tinggi pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti masing-masing sebesar 5,70 persen; 4,70 persen; dan 4,60 persen. Penurunan produksi batubara yang pernah terjadi secara signifikan di Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu pada tahun 2015 dan menyebabkan terjadinya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi di kedua kabupaten tersebut, saat ini sudah menunjukkan perbaikan. Hal ini ditandai dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di dua kabupaten ini pada tahun 2017 masing-masing sebesar 4,43 persen dan 4,18 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas kabupaten/kota se-Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 3.5.

### 3.5 Kontribusi PDRB tanpa Migas Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui peran kabupaten/kota dalam perekonomian provinsi dapat dilihat melalui kontribusi PDRB kabupaten/kota atas dasar harga berlaku terhadap total PDRB pada suatu provinsi.

Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa selama kurun waktu tahun 2015-2017, Kota Pekanbaru masih menempati urutan

teratas dalam pembentukan ekonomi Riau tanpa migas (18,35 %). Peran yang cukup dominan berikutnya pada tahun 2017 adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Siak dengan kontribusi masing-masing sebesar 11,06 persen, 10,45 persen dan 10,24 persen.

**Tabel 3.6**  
**Kontribusi PDRB tanpa Migas**  
**Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau,**  
**2015-2017 (%)**

Kabupaten/Kota	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kuantan Singingi	5,28	5,30	5,34
2. Indragiri Hulu	7,00	6,89	6,80
3. Indragiri Hilir	10,85	11,04	11,06
4. Pelalawan	7,81	7,75	7,79
5. Siak	10,82	10,53	10,24
6. Kampar	9,67	9,65	9,56
7. Rokan Hulu	5,45	5,43	5,46
8. Bengkalis	10,62	10,61	10,45
9. Rokan Hilir	9,08	8,99	8,82
10. Kep. Meranti	2,48	2,49	2,49
11. Pekanbaru	17,53	17,78	18,35
12. Dumai	3,43	3,53	3,63
<b>RIAU</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan: \*) Angka sementara

\*\*\*) Angka sangat sementara

Peran keempat kabupaten/kota tersebut sangat signifikan dalam membentuk perekonomian Provinsi Riau tanpa migas, terutama Kota Pekanbaru sebagai pusat konsentrasi aktivitas ekonomi.

Secara umum pembangunan ekonomi setiap kabupaten/kota berjalan dengan baik yang terlihat dari komposisi kontribusi PDRB dalam perekonomian Riau yang relatif stabil hingga tahun 2017. Kondisi ini dapat diartikan adanya keselarasan dalam kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari setiap kabupaten/kota terhadap total penciptaan barang dan jasa di Provinsi Riau. Selama 3 tahun terakhir, tidak terdapat pergeseran komposisi kontribusi PDRB kabupaten/kota terhadap perekonomian Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten hasil pemekaran yang masih relatif baru hanya mampu berkontribusi sekitar 2 persen dalam perekonomian Riau.

Kota Pekanbaru masih yang paling besar kontribusinya dalam perekonomian Riau, sehingga dapat dikatakan bahwa selain menjadi pusat pemerintahan ibukota provinsi, Kota Pekanbaru juga menjadi pusat perekonomian. Di samping itu, dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang lain, diharapkan mampu menjadi lokomotif baru perekonomian di Provinsi Riau di kemudian hari.

### 3.6 PDRB Per Kapita tanpa Migas Kabupaten/Kota

Salah satu tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang disertai upaya pengentasan kemiskinan antara lain dengan melakukan perbaikan kondisi kesehatan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kualitas dan menciptakan kemandirian SDM sehingga berpeluang besar dapat berperan dalam memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai

tambah yang dinikmati per penduduk secara nominal, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah yang dinikmati per penduduk secara riil.

PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 3.7. PDRB per kapita Riau tanpa migas atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2015-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2015 sebesar Rp 75,56 juta naik menjadi Rp 79,92 juta pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi Rp 82,43 juta pada tahun 2017, demikian pula PDRB per kapita kabupaten/kota selama kurun waktu yang sama juga mengalami peningkatan.

**Tabel 3.7**  
**PDRB Per Kapita Tanpa Migas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2015-2017 (Juta Rp)**

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2015	2016*	2017**	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kuantan Singingi	80,17	86,56	91,89	63,31	65,01	67,19
2. Indragiri Hulu	81,56	85,78	88,15	61,49	62,52	63,89
3. Indragiri Hilir	73,61	80,48	84,57	53,89	55,76	57,64
4. Pelalawan	93,94	96,53	97,99	73,71	72,20	71,59
5. Siak	117,11	120,82	121,55	87,98	87,30	87,66
6. Kampar	58,19	61,71	63,43	45,81	46,33	47,57
7. Rokan Hulu	43,90	45,81	47,01	34,33	34,58	35,14
8. Bengkalis	93,16	99,97	103,24	68,16	69,41	70,41
9. Rokan Hilir	67,24	70,56	71,69	49,66	50,05	50,70
10. Kep. Meranti	65,48	71,13	75,13	52,21	54,26	56,40
11. Pekanbaru	80,59	86,78	92,88	55,50	57,34	59,36
12. Dumai	57,19	62,78	67,43	44,99	46,80	48,78
<b>Riau</b>	<b>75,56</b>	<b>79,92</b>	<b>82,43</b>	<b>56,51</b>	<b>57,22</b>	<b>58,42</b>

Keterangan: \*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Pada tahun 2017, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi adalah Kabupaten Siak sebesar Rp 121,55 juta pertahun, dan jika dilihat secara riil (atas dasar harga konstan) PDRB per kapita tertinggi selama tahun 2017 juga dicapai oleh Kabupaten Siak dengan nilai Rp 87,66 juta pertahun. Semakin tingginya PDRB per kapita, dapat diartikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan Kabupaten Siak yang merupakan daerah pemekaran dengan otonomi daerah berdampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian.

### **3.7 Struktur Ekonomi Tiga Lapangan Usaha Utama tanpa Migas Kabupaten/Kota**

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan lapangan-lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Nilai tambah yang terbentuk dari masing-masing lapangan usaha menggambarkan struktur ekonomi dalam wilayah tersebut. Untuk melihat keterbandingan struktur ekonomi kabupaten/kota, berikut disajikan ulasan mengenai

distribusi persentase PDRB kabupaten/kota atas dasar harga berlaku tahun 2015-2017 yang dikelompokkan menjadi tiga kegiatan ekonomi utama yakni kegiatan ekonomi primer, sekunder, dan tersier.

Kegiatan ekonomi primer mencakup lapangan usaha pertanian (kategori A) dan pertambangan dan penggalian (kategori B). Sementara kegiatan ekonomi sekunder meliputi lapangan usaha industri pengolahan (kategori C), lapangan usaha listrik dan gas (kategori D), lapangan usaha pengadaan air dan pengelolaan sampah (kategori E), dan lapangan usaha konstruksi (kategori F). Selanjutnya kegiatan ekonomi tersier meliputi lapanganh usaha perdagangan (kategori G), lapangan usaha angkutan (kategori H), lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum (kategori I), lapangan usaha informasi dan komunikasi (kategori J), lapangan usaha jasa keuangan (sektor K), lapangan usaha real estate (kategori L), jasa perusahaan (kategori M dan N), administrasi pemerintahan, dsb. (kategori O), jasa pendidikan (kategori P), jasa kesehatan (kategori Q), dan

lapangan usaha jasa lainnya (kategori R,S,T dan U).

Pada tahun 2015-2017, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau perekonomiannya digerakkan oleh

kegiatan ekonomi primer. Kondisi ini terjadi terutama di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti.

**Tabel 3.8**  
**Struktur Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten/Kota Menurut Kegiatan Ekonomi Primer, Sekunder, dan Tersier, 2015-2017 (%)**

Kabupaten/Kota	2015			2016*			2017**		
	Pri.	Sek.	Ter.	Pri.	Sek.	Ter.	Pri.	Sek.	Ter.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Kuantan Singingi	55,10	34,59	10,31	54,66	35,20	10,14	54,26	35,80	9,94
2. Indragiri Hulu	37,61	43,81	18,58	36,95	44,24	18,81	36,45	44,39	19,16
3. Indragiri Hilir	48,99	30,22	20,79	48,76	29,83	21,41	48,96	29,22	21,82
4. Pelalawan	40,46	52,29	7,26	40,45	52,35	7,20	40,54	52,30	7,16
5. Siak	34,42	58,35	7,23	35,04	57,61	7,35	35,42	57,08	7,50
6. Kampar	48,41	40,96	10,63	48,68	40,69	10,63	48,26	40,96	10,78
7. Rokan Hulu	57,48	28,53	13,99	56,88	29,26	13,85	56,01	30,22	13,77
8. Bengkalis	54,90	26,82	18,27	53,79	27,58	18,63	50,85	29,42	19,73
9. Rokan Hilir	64,34	26,70	8,97	64,32	26,78	8,91	62,93	27,93	9,13
10. Kep. Meranti	44,86	36,02	19,12	45,62	35,50	18,88	45,46	35,78	18,76
11. Pekanbaru	1,62	49,76	48,62	1,65	49,85	48,50	1,62	49,77	48,61
12. Dumai	10,22	44,87	44,91	9,87	47,38	42,75	9,59	49,25	41,17
<b>Riau</b>	<b>38,71</b>	<b>40,64</b>	<b>20,65</b>	<b>38,39</b>	<b>40,86</b>	<b>20,75</b>	<b>37,73</b>	<b>41,29</b>	<b>20,98</b>

Keterangan: \*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Sementara kegiatan ekonomi sekunder setiap tahunnya lebih berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Kota Pekanbaru, dan Dumai. Pada tahun 2017, lebih dari 50

persen kegiatan ekonomi sekunder dominan dalam perekonomian Kabupaten Siak dan Pelalawan (57,08% dan 52,30%). Sedangkan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hulu, peran kegiatan ekonomi sekunder dalam perekonomiannya masing-masing

sebesar 49,77 persen dan 44,39 persen. Besarnya peranan kegiatan ekonomi sekunder dalam menggerakkan roda perekonomian mengindikasikan bahwa lapangan usaha industri pengolahan mampu *men-drive* perekonomian di wilayah tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan kinerja lapangan usaha industri pengolahan harus senantiasa didukung oleh kemudahan akan ketersediaan bahan baku dan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, kegiatan ekonomi tersier yang merupakan representasi lapangan usaha jasa-jasa, ternyata berperan cukup signifikan di Kota Dumai pada tahun 2015, kemudian terjadi pergeseran di tahun 2016 dan 2017 ke kegiatan ekonomi sekunder. Pada tahun 2017, peranan kegiatan ekonomi sekunder terhadap perekonomian Kota Dumai mencapai 49,25 persen.

Secara umum perekonomian kabupaten/kota tergambarkan dalam struktur perekonomian Riau. Perekonomian Provinsi Riau sudah mulai bergeser dari kegiatan ekonomi primer ke kegiatan ekonomi sekunder. Hal ini terlihat dari besarnya peranan kegiatan ekonomi sekunder yang sedikit lebih

tinggi dibandingkan dengan kegiatan ekonomi primer. Pada tahun 2017 tercatat kegiatan ekonomi sekunder sebesar 41,29 persen, sedangkan kegiatan ekonomi primer sebesar 37,73 persen.

Lampiran

Tabel-Tabel Pokok





**Tabel 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.058.261,73	11.468.111,02	12.465.327,10	13.652.387,35	14.575.199,44
B	Pertambangan dan Penggalian	2.126.933,21	2.291.269,13	1.417.520,96	1.389.268,30	1.441.826,87
C	Industri Pengolahan	5.640.113,33	6.189.459,35	6.771.966,23	7.555.426,64	8.221.775,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.639,26	5.898,31	8.749,42	12.318,30	14.875,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.714,26	4.983,08	5.518,16	5.754,13	6.285,45
F	Konstruksi	1.581.641,19	1.731.062,79	1.929.239,62	2.114.688,04	2.323.897,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	746.208,28	906.345,04	993.440,43	1.088.443,14	1.160.969,52
H	Transportasi dan Pergudangan	88.352,09	102.567,77	122.651,22	134.308,23	144.026,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.324,66	47.544,40	54.685,53	62.580,59	69.405,78
J	Informasi dan Komunikasi	81.361,41	83.394,05	96.071,03	100.767,32	105.373,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	141.796,45	157.346,90	154.581,67	161.181,01	166.542,67
L	Real Estate	145.553,66	162.053,60	191.496,20	205.550,12	222.324,11
M,N	Jasa Perusahaan	195,18	224,67	255,09	275,26	294,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	586.894,03	605.225,91	662.455,54	688.565,93	698.653,07
P	Jasa Pendidikan	118.015,19	130.186,08	154.379,40	168.526,07	174.428,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32.403,43	38.790,23	47.760,37	50.212,66	51.871,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	81.312,31	97.274,12	118.785,26	130.357,64	139.256,85
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>21.476.719,67</b>	<b>24.021.736,43</b>	<b>25.194.883,23</b>	<b>27.520.610,72</b>	<b>29.517.007,71</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>21.476.719,67</b>	<b>24.021.736,43</b>	<b>25.194.883,23</b>	<b>27.520.610,72</b>	<b>29.517.007,71</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.064.999,42	9.516.810,88	9.582.977,26	10.005.881,06	10.482.005,73
B	Pertambangan dan Penggalian	1.963.532,05	2.079.161,05	1.123.496,78	1.014.276,10	995.039,62
C	Industri Pengolahan	5.244.747,01	5.582.577,93	5.890.494,62	6.244.981,53	6.585.606,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.692,43	6.210,64	6.807,76	8.219,17	8.645,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.338,15	4.391,12	4.486,33	4.455,33	4.622,54
F	Konstruksi	1.237.998,87	1.261.373,27	1.333.550,13	1.390.304,27	1.458.672,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	674.462,05	699.250,99	707.193,51	733.385,13	761.592,02
H	Transportasi dan Pergudangan	75.109,25	81.415,17	90.760,72	94.000,98	97.647,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.667,06	35.509,28	38.149,45	40.791,17	43.292,68
J	Informasi dan Komunikasi	73.903,20	74.483,71	77.337,71	80.594,08	84.163,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	115.628,18	121.991,32	115.193,00	116.079,51	116.174,95
L	Real Estate	127.003,08	133.041,81	144.040,67	146.128,76	149.521,45
M,N	Jasa Perusahaan	166,69	178,85	192,11	196,67	205,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	515.749,55	520.176,32	548.691,96	549.872,65	549.800,18
P	Jasa Pendidikan	100.219,32	104.306,91	112.509,57	114.976,60	116.983,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28.737,00	31.284,65	34.490,74	34.582,86	35.019,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	72.980,38	78.990,92	85.975,83	90.325,64	94.852,82
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>19.336.933,71</b>	<b>20.331.154,81</b>	<b>19.896.348,12</b>	<b>20.669.051,52</b>	<b>21.583.844,37</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>19.336.933,71</b>	<b>20.331.154,81</b>	<b>19.896.348,12</b>	<b>20.669.051,52</b>	<b>21.583.844,37</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN INDRAGIRI HULU ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.056.364,46	9.156.680,79	10.015.106,70	10.692.978,16	11.167.249,18
B	Pertambangan dan Penggalian	5.809.953,09	5.968.694,74	3.735.297,95	3.744.246,73	3.713.156,53
C	Industri Pengolahan	7.583.812,33	8.795.083,59	9.700.960,36	10.567.967,60	11.040.993,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.288,13	10.574,33	15.929,73	21.455,91	24.986,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.341,94	14.801,06	15.492,97	15.976,65	16.520,89
F	Konstruksi	3.654.689,47	4.277.275,18	4.897.100,49	5.246.605,75	5.581.420,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.539.709,10	3.066.429,49	3.458.570,58	3.799.942,73	4.083.075,32
H	Transportasi dan Pergudangan	307.790,51	340.715,09	374.291,61	398.143,66	419.566,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	215.626,38	252.940,31	277.825,03	302.768,76	326.684,79
J	Informasi dan Komunikasi	173.461,66	190.621,82	214.189,93	234.770,40	261.356,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	289.245,93	318.959,51	325.640,45	342.410,62	356.679,27
L	Real Estate	325.773,36	382.293,35	439.097,62	469.484,37	489.519,33
M,N	Jasa Perusahaan	890,24	1.004,25	1.129,40	1.221,90	1.333,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	491.541,01	518.143,56	562.355,60	580.959,40	598.060,02
P	Jasa Pendidikan	195.987,78	217.552,47	253.634,67	277.567,14	294.201,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46.163,89	55.368,21	67.777,47	72.832,58	78.246,57
R,S,T,U	Jasa lainnya	160.643,16	195.344,03	229.195,08	261.879,50	285.232,84
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>29.872.282,45</b>	<b>33.762.481,76</b>	<b>34.583.595,62</b>	<b>37.031.211,86</b>	<b>38.738.283,90</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>28.484.734,68</b>	<b>32.221.931,90</b>	<b>33.393.517,96</b>	<b>35.833.734,92</b>	<b>37.542.739,50</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 4. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN INDRAGIRI HULU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.999.186,36	7.460.810,01	7.615.568,69	7.853.857,44	8.114.036,46
B	Pertambangan dan Penggalian	4.310.700,84	4.421.590,93	2.620.767,93	2.546.812,55	2.486.916,58
C	Industri Pengolahan	6.821.297,15	7.283.114,66	7.758.019,65	8.219.965,12	8.740.510,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.231,89	11.194,09	12.278,83	14.283,89	14.759,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.014,14	14.057,77	14.343,71	14.248,02	14.502,67
F	Konstruksi	2.862.416,54	3.047.581,75	3.238.451,40	3.372.626,85	3.512.866,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.241.890,44	2.304.464,39	2.398.837,55	2.534.273,97	2.676.926,78
H	Transportasi dan Pergudangan	264.902,08	279.230,92	292.515,09	298.824,57	306.907,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	181.231,98	192.783,99	199.698,03	208.074,18	217.451,21
J	Informasi dan Komunikasi	153.655,47	164.088,68	177.175,41	188.593,47	202.015,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	237.050,30	249.551,07	244.992,95	247.045,92	246.832,49
L	Real Estate	283.351,43	304.999,48	327.850,30	334.718,47	343.548,83
M,N	Jasa Perusahaan	761,93	812,76	866,06	901,07	961,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	448.363,60	458.064,39	480.779,16	481.688,77	488.717,49
P	Jasa Pendidikan	164.039,72	171.959,03	183.477,07	187.360,67	195.939,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42.300,84	45.492,11	49.981,64	50.628,07	53.259,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	146.735,26	162.100,35	175.923,94	187.674,09	200.268,48
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>25.180.129,97</b>	<b>26.571.896,38</b>	<b>25.791.527,40</b>	<b>26.741.577,11</b>	<b>27.816.420,55</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>24.562.601,37</b>	<b>25.953.462,47</b>	<b>25.175.964,99</b>	<b>26.117.440,66</b>	<b>27.209.525,94</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.474.836,76	23.579.654,60	25.053.880,08	27.630.167,13	29.396.923,20
B	Pertambangan dan Penggalian	326.368,14	353.736,85	325.049,65	348.233,06	505.698,50
C	Industri Pengolahan	10.528.738,45	11.725.636,60	12.856.416,05	14.026.936,13	14.411.218,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.943,91	14.558,50	20.398,78	26.255,27	32.448,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.688,51	6.785,26	7.229,40	7.441,95	8.788,20
F	Konstruksi	2.170.526,71	2.445.044,46	2.769.020,04	3.060.023,73	3.394.434,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.277.337,04	6.731.766,42	7.453.431,50	8.663.606,12	9.437.745,00
H	Transportasi dan Pergudangan	430.552,85	496.296,92	564.488,62	631.048,57	680.840,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180.893,27	204.242,08	221.687,65	243.068,71	268.596,00
J	Informasi dan Komunikasi	239.289,78	255.745,92	292.744,64	316.048,31	339.794,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	256.261,71	305.598,33	303.462,91	335.642,19	335.915,15
L	Real Estate	305.992,93	343.074,48	403.485,62	448.343,71	498.230,00
M,N	Jasa Perusahaan	1.068,06	1.291,43	1.438,74	1.636,75	1.830,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	826.550,07	878.536,08	956.816,51	992.567,33	1.055.602,00
P	Jasa Pendidikan	192.446,59	237.455,79	281.775,32	326.554,63	346.346,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49.036,17	57.867,17	70.479,56	80.571,03	82.495,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	158.246,78	184.387,48	218.287,43	247.014,54	279.738,00
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>41.437.777,71</b>	<b>47.821.678,35</b>	<b>51.800.092,51</b>	<b>57.385.159,15</b>	<b>61.076.643,18</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>41.437.777,71</b>	<b>47.821.678,35</b>	<b>51.800.092,51</b>	<b>57.385.159,15</b>	<b>61.076.643,18</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 6. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.368.365,90	17.638.724,09	17.753.869,97	18.640.157,39	19.371.106,44
B	Pertambangan dan Penggalian	281.664,28	299.857,32	235.796,48	239.071,56	343.172,67
C	Industri Pengolahan	9.632.728,01	10.160.173,73	10.485.219,39	10.939.059,92	11.357.659,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.542,29	14.573,87	15.494,76	17.639,45	18.402,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.651,31	5.691,78	5.852,23	5.932,69	6.864,93
F	Konstruksi	1.629.661,58	1.751.925,10	1.856.197,64	1.972.464,16	2.103.910,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.630.909,75	4.940.133,85	5.103.141,62	5.363.626,94	5.745.547,47
H	Transportasi dan Pergudangan	349.009,20	378.776,95	397.815,72	424.007,14	448.193,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	154.351,85	165.282,91	170.601,33	179.661,50	191.868,57
J	Informasi dan Komunikasi	202.862,82	214.559,23	233.742,07	247.933,95	264.213,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	214.403,78	243.255,13	230.171,55	245.044,59	238.013,56
L	Real Estate	257.307,73	273.708,53	297.027,91	315.734,90	337.004,63
M,N	Jasa Perusahaan	920,18	990,51	1.054,46	1.122,67	1.200,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	690.298,58	705.865,24	748.974,93	751.722,59	762.718,76
P	Jasa Pendidikan	161.418,69	173.699,42	185.217,01	197.243,36	203.997,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41.668,05	45.304,84	49.848,04	53.786,97	54.283,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	134.744,22	148.278,41	153.447,15	164.192,85	179.307,05
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>34.769.508,24</b>	<b>37.160.800,90</b>	<b>37.923.472,25</b>	<b>39.758.402,64</b>	<b>41.627.466,09</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>34.769.508,24</b>	<b>37.160.800,90</b>	<b>37.923.472,25</b>	<b>39.758.402,64</b>	<b>41.627.466,09</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PELALAWAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.020.964,20	13.626.520,83	14.886.970,31	16.089.030,02	17.213.570,45
B	Pertambangan dan Penggalian	1.147.354,12	1.322.014,36	1.084.669,77	1.075.781,97	1.082.411,38
C	Industri Pengolahan	15.061.503,96	17.228.413,07	18.623.167,64	20.138.830,86	21.440.201,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.331,21	6.330,30	9.668,89	12.776,26	15.278,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.418,24	2.504,07	2.658,70	2.728,66	2.862,87
F	Konstruksi	623.083,02	739.415,81	862.939,83	944.146,25	1.028.478,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	890.704,55	1.089.412,70	1.173.877,39	1.263.680,78	1.348.240,50
H	Transportasi dan Pergudangan	66.891,22	77.867,57	88.830,71	95.292,61	100.903,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52.624,35	66.186,04	72.596,73	79.028,54	84.207,94
J	Informasi dan Komunikasi	144.207,84	161.116,07	184.395,30	195.801,43	210.908,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	229.820,20	214.785,70	206.167,62	232.117,40	244.070,26
L	Real Estate	181.240,99	212.696,09	244.074,74	259.680,91	279.637,45
M,N	Jasa Perusahaan	372,40	430,33	484,96	517,79	544,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	379.616,35	402.092,65	435.114,07	455.039,28	464.542,73
P	Jasa Pendidikan	95.640,14	111.199,79	131.840,77	138.629,80	146.178,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39.779,97	46.513,37	57.420,18	59.966,23	64.599,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	78.181,64	93.666,57	111.555,94	122.543,68	135.473,30
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>31.018.734,42</b>	<b>35.401.165,31</b>	<b>38.176.433,57</b>	<b>41.165.592,46</b>	<b>43.862.109,69</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>30.004.749,43</b>	<b>34.242.820,27</b>	<b>37.291.385,17</b>	<b>40.301.461,54</b>	<b>42.995.315,39</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 8. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PELALAWAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.477.340,05	11.069.808,91	11.073.786,37	11.355.693,69	11.862.885,94
B	Pertambangan dan Penggalian	624.379,79	644.835,94	650.800,18	648.595,18	632.652,85
C	Industri Pengolahan	13.909.438,66	14.842.336,12	15.422.798,99	15.922.829,63	16.566.038,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.008,76	6.511,64	7.165,46	8.486,30	9.104,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.105,53	2.155,34	2.203,90	2.194,72	2.233,85
F	Konstruksi	546.921,42	600.379,89	655.093,03	681.434,75	724.486,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	692.037,24	752.324,29	774.466,24	810.577,66	851.187,57
H	Transportasi dan Pergudangan	57.769,01	62.311,44	66.412,84	68.509,22	70.114,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42.398,86	45.811,07	47.847,43	49.571,75	51.192,94
J	Informasi dan Komunikasi	141.135,69	151.863,84	163.815,18	171.418,80	181.089,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	187.178,08	167.239,04	152.299,34	165.395,47	169.874,12
L	Real Estate	159.492,32	174.585,87	188.605,49	191.366,60	198.202,36
M,N	Jasa Perusahaan	323,93	349,32	371,80	380,03	389,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	335.744,14	342.845,13	356.521,36	361.321,38	363.948,98
P	Jasa Pendidikan	78.236,41	84.908,28	92.214,35	93.067,46	95.847,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34.192,72	36.601,62	40.247,41	40.420,60	41.911,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	66.936,32	73.441,54	79.652,21	83.643,03	90.131,68
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>27.360.638,95</b>	<b>29.058.309,27</b>	<b>29.774.301,57</b>	<b>30.654.906,26</b>	<b>31.911.291,78</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>26.858.841,11</b>	<b>28.545.905,99</b>	<b>29.263.364,26</b>	<b>30.144.876,90</b>	<b>31.415.007,47</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 9. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SIAK ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.621.360,01	12.897.720,74	13.340.709,08	14.575.403,76	15.661.153,78
B	Pertambangan dan Penggalian	42.292.629,24	41.157.661,95	30.039.629,15	28.813.396,88	27.416.903,48
C	Industri Pengolahan	22.575.616,32	25.205.050,02	26.896.894,16	27.933.575,84	28.466.192,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.787,78	3.336,65	4.835,14	6.032,69	6.986,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.319,78	2.412,32	2.702,75	2.822,21	2.944,69
F	Konstruksi	2.754.976,14	2.985.731,35	3.218.294,48	3.591.254,93	3.815.828,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.016.692,25	1.350.723,00	1.414.083,11	1.562.041,64	1.664.802,98
H	Transportasi dan Pergudangan	60.680,09	67.150,47	74.928,43	81.319,39	86.922,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24.461,41	30.181,80	33.007,00	36.029,24	38.326,40
J	Informasi dan Komunikasi	126.834,85	137.777,72	150.848,19	160.717,41	172.187,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	224.310,45	275.763,53	264.946,90	274.767,33	288.676,15
L	Real Estate	236.853,44	276.428,61	303.008,41	324.228,27	337.321,89
M,N	Jasa Perusahaan	3.148,14	3.776,30	4.089,46	4.349,23	4.573,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	528.067,89	556.838,37	600.349,17	619.670,52	635.667,83
P	Jasa Pendidikan	297.735,06	341.319,87	372.611,53	393.146,91	405.766,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.293,98	121.435,37	146.885,91	153.569,23	157.918,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	258.957,60	322.214,04	367.749,44	411.177,10	451.024,19
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>82.129.724,43</b>	<b>85.735.522,14</b>	<b>77.235.572,31</b>	<b>78.943.502,57</b>	<b>79.613.198,07</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>43.074.856,35</b>	<b>48.347.376,87</b>	<b>51.626.000,07</b>	<b>54.737.334,89</b>	<b>56.571.062,69</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 10. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SIAK ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.201.456,59	10.700.615,11	10.634.282,93	10.981.665,95	11.667.617,55
B	Pertambangan dan Penggalian	17.877.016,04	15.919.549,64	14.906.724,79	14.270.954,80	13.395.097,82
C	Industri Pengolahan	19.524.775,25	20.295.907,79	21.072.743,11	21.393.561,51	21.881.462,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.519,12	2.981,32	3.374,25	3.924,15	4.052,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.209,69	2.230,24	2.294,39	2.300,75	2.325,66
F	Konstruksi	1.895.824,97	1.946.645,45	2.070.267,64	2.136.627,25	2.225.329,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	888.228,73	922.666,00	939.336,20	989.669,79	1.038.479,47
H	Transportasi dan Pergudangan	50.950,43	52.981,61	56.311,59	58.001,28	60.088,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.099,79	19.849,45	20.625,28	21.071,99	21.921,64
J	Informasi dan Komunikasi	121.212,12	126.602,68	133.519,62	137.175,59	143.274,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	181.182,11	211.121,90	194.399,31	195.315,17	197.140,66
L	Real Estate	188.312,44	204.585,97	219.179,53	223.668,98	229.534,05
M,N	Jasa Perusahaan	2.520,05	2.729,13	2.823,61	2.854,99	2.945,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	483.113,60	493.055,69	513.349,46	515.527,58	518.873,97
P	Jasa Pendidikan	247.186,27	248.271,21	250.118,70	251.810,88	256.305,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86.975,31	93.611,64	102.594,24	103.544,24	104.924,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	215.091,46	241.777,75	257.351,63	270.553,77	295.562,40
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>51.987.673,97</b>	<b>51.485.182,58</b>	<b>51.379.296,29</b>	<b>51.558.228,66</b>	<b>52.044.935,65</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>36.245.779,58</b>	<b>37.806.324,58</b>	<b>38.786.332,85</b>	<b>39.552.902,91</b>	<b>40.797.774,55</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 11. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KAMPAR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.636.647,44	15.347.655,66	16.483.570,83	18.200.031,39	19.597.747,44
B	Pertambangan dan Penggalian	28.026.208,33	31.556.994,58	25.993.640,08	25.737.541,34	24.678.050,22
C	Industri Pengolahan	12.524.987,69	13.519.605,58	14.565.372,27	15.572.002,11	16.488.540,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16.305,12	20.838,64	28.328,55	34.422,12	40.839,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.083,63	3.189,03	3.545,53	3.626,65	3.873,35
F	Konstruksi	3.371.882,95	3.837.039,44	4.305.275,77	4.795.219,92	5.091.358,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.547.848,27	1.921.933,72	2.067.904,44	2.277.153,51	2.433.991,95
H	Transportasi dan Pergudangan	142.294,62	156.825,45	183.860,99	202.868,32	218.379,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43.219,81	47.046,41	52.190,33	58.917,19	62.243,08
J	Informasi dan Komunikasi	209.926,29	226.224,08	246.012,94	253.597,89	272.571,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	221.937,62	257.657,96	260.465,95	283.089,49	298.828,80
L	Real Estate	475.331,52	539.261,46	594.528,03	645.802,44	675.304,70
M,N	Jasa Perusahaan	1.679,56	1.984,85	2.158,36	2.366,89	2.507,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	847.065,54	870.965,26	907.456,10	961.778,39	1.030.103,20
P	Jasa Pendidikan	236.780,92	261.174,35	299.403,77	330.228,12	356.472,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78.129,38	91.503,26	115.990,56	124.707,60	128.470,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	132.179,64	157.010,26	175.460,24	191.305,80	210.694,54
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>61.515.508,33</b>	<b>68.816.910,00</b>	<b>66.285.164,73</b>	<b>69.674.659,16</b>	<b>71.589.977,04</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>37.603.168,79</b>	<b>42.053.200,28</b>	<b>46.145.964,52</b>	<b>50.149.494,05</b>	<b>52.794.172,37</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 12. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KAMPAR ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.380.412,04	12.984.986,36	13.031.866,01	13.672.507,27	14.602.668,88
B	Pertambangan dan Penggalian	13.819.943,13	13.880.141,99	13.921.701,14	13.820.703,87	13.083.378,59
C	Industri Pengolahan	11.966.078,23	12.476.389,30	12.668.783,29	13.205.269,80	14.163.026,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.703,89	18.986,46	20.677,29	23.273,13	24.392,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.810,61	2.843,31	2.902,06	2.879,92	2.959,69
F	Konstruksi	2.670.876,93	2.857.494,47	3.004.099,01	3.126.365,84	3.236.101,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.318.279,47	1.390.105,06	1.399.614,57	1.453.316,96	1.536.742,34
H	Transportasi dan Pergudangan	125.239,41	128.872,49	139.482,33	147.154,10	155.440,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35.476,89	36.322,43	37.731,73	39.334,12	40.942,43
J	Informasi dan Komunikasi	190.965,89	197.505,21	202.255,90	206.361,69	210.447,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	203.656,49	221.798,98	213.960,41	221.559,57	228.161,44
L	Real Estate	412.427,11	431.255,65	450.362,92	456.799,22	470.366,16
M,N	Jasa Perusahaan	1.462,55	1.608,00	1.659,24	1.709,68	1.780,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	756.655,21	766.088,32	781.539,58	781.992,87	811.552,20
P	Jasa Pendidikan	208.852,69	215.569,74	220.120,81	226.416,26	238.778,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.805,32	75.139,43	82.164,14	83.104,60	84.592,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	118.936,94	131.358,63	135.146,18	140.294,96	151.257,50
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>44.297.582,79</b>	<b>45.816.465,83</b>	<b>46.314.066,60</b>	<b>47.609.043,87</b>	<b>49.042.587,29</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>34.124.190,54</b>	<b>35.775.605,73</b>	<b>36.328.334,79</b>	<b>37.650.273,54</b>	<b>39.592.744,98</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 13. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ROKAN HULU ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.687.739,14	13.544.999,34	14.167.972,12	15.231.286,49	16.058.039,69
B	Pertambangan dan Penggalian	1.490.200,94	1.943.681,95	1.683.176,47	1.722.629,33	1.720.155,08
C	Industri Pengolahan	4.799.155,36	5.629.795,53	6.432.945,52	7.198.819,17	7.952.047,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.019,41	11.818,66	17.938,64	23.664,08	28.120,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.623,12	1.731,20	1.901,87	2.014,72	2.087,20
F	Konstruksi	766.016,69	864.146,32	965.386,26	1.039.993,99	1.127.241,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.072.297,44	1.362.703,25	1.489.490,70	1.645.264,95	1.767.230,42
H	Transportasi dan Pergudangan	103.283,97	120.568,52	139.555,09	157.308,80	172.038,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68.391,62	85.983,32	93.345,93	100.106,12	106.102,58
J	Informasi dan Komunikasi	205.833,07	220.182,44	240.326,66	257.088,77	277.666,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	256.416,46	272.689,33	263.448,49	281.904,59	300.221,21
L	Real Estate	146.079,39	165.910,66	187.583,03	203.681,29	213.890,64
M,N	Jasa Perusahaan	1.034,84	1.238,22	1.359,85	1.448,98	1.573,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	814.836,57	865.082,98	909.866,75	924.182,62	945.652,64
P	Jasa Pendidikan	93.478,65	108.272,46	126.607,93	135.896,49	142.540,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39.533,14	46.280,12	55.224,35	58.907,98	62.113,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	89.475,65	110.332,22	131.028,36	146.470,86	161.088,79
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>21.645.415,45</b>	<b>25.355.416,52</b>	<b>26.907.158,04</b>	<b>29.130.669,23</b>	<b>31.037.808,47</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>20.691.095,98</b>	<b>24.058.031,04</b>	<b>25.999.437,17</b>	<b>28.242.342,76</b>	<b>30.143.262,97</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 14. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ROKAN HULU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.576.371,33	11.196.878,21	11.115.856,75	11.563.815,15	12.115.777,58
B	Pertambangan dan Penggalian	894.627,81	1.011.595,08	1.030.079,36	1.020.925,70	1.001.708,37
C	Industri Pengolahan	4.579.622,66	4.961.825,40	5.324.864,46	5.749.754,69	6.280.402,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.492,19	12.600,50	13.845,73	15.785,71	16.690,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.578,14	1.594,48	1.631,48	1.649,52	1.680,48
F	Konstruksi	572.353,98	595.760,48	621.460,22	649.618,58	690.268,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	944.173,27	992.591,97	1.015.469,70	1.065.779,01	1.125.646,45
H	Transportasi dan Pergudangan	94.852,99	100.680,98	107.105,93	113.523,96	120.055,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52.509,96	54.805,41	56.435,70	58.654,30	61.309,47
J	Informasi dan Komunikasi	208.681,84	218.008,09	228.084,42	239.164,13	250.426,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	209.753,15	212.257,00	197.134,97	206.224,30	211.359,26
L	Real Estate	131.094,02	138.220,80	146.539,90	149.148,31	152.640,94
M,N	Jasa Perusahaan	869,19	955,98	993,55	1.015,49	1.074,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	681.436,82	697.064,59	724.558,93	726.511,97	731.659,61
P	Jasa Pendidikan	76.500,87	79.783,35	83.688,00	85.303,18	88.259,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34.360,54	36.211,20	39.519,48	39.810,38	41.158,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	77.282,75	85.469,59	93.395,78	98.560,57	106.159,17
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>19.150.561,51</b>	<b>20.396.303,11</b>	<b>20.800.664,35</b>	<b>21.785.244,96</b>	<b>22.996.276,91</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>18.759.474,20</b>	<b>19.920.467,62</b>	<b>20.332.586,99</b>	<b>21.317.276,66</b>	<b>22.533.097,33</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara



**Tabel 15. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BENGKALIS ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.964.979,37	9.045.114,89	10.103.901,44	11.201.413,45	11.988.387,20
B	Pertambangan dan Penggalian	129.003.600,63	133.081.461,54	99.125.944,50	92.039.558,18	88.786.725,56
C	Industri Pengolahan	10.952.175,45	12.680.272,68	14.052.799,86	15.465.796,72	17.167.110,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.395,03	12.094,49	16.776,01	24.201,21	31.769,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.075,17	10.678,42	11.764,48	12.379,98	14.148,83
F	Konstruksi	2.133.810,11	2.561.565,53	2.933.889,40	3.295.536,27	3.658.669,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.101.748,29	5.730.958,87	6.153.984,30	6.924.146,40	7.758.474,88
H	Transportasi dan Pergudangan	202.113,56	232.925,47	270.793,09	297.088,40	336.470,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203.135,45	283.649,12	298.471,11	329.788,14	352.473,67
J	Informasi dan Komunikasi	242.240,18	289.423,46	335.007,08	357.966,16	405.508,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	276.533,19	293.312,94	288.467,64	323.211,55	333.340,01
L	Real Estate	235.195,12	265.454,36	302.679,86	326.124,59	349.289,70
M,N	Jasa Perusahaan	2.622,67	3.125,22	3.560,03	3.916,98	4.414,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	873.048,43	907.407,33	1.002.245,10	1.036.720,92	1.091.009,55
P	Jasa Pendidikan	204.737,96	250.426,38	298.497,07	329.532,63	365.450,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57.085,45	67.996,71	84.519,94	90.326,82	98.688,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	152.944,21	183.169,13	221.618,14	256.552,86	293.595,10
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>156.624.440,27</b>	<b>165.899.036,53</b>	<b>135.504.919,07</b>	<b>132.314.261,27</b>	<b>133.035.527,36</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>36.612.625,59</b>	<b>44.579.450,85</b>	<b>50.677.690,12</b>	<b>55.153.594,99</b>	<b>57.720.570,42</b>

Keterangan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 16. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BENGKALIS ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.148.402,63	7.438.546,17	7.440.747,66	7.712.296,91	8.116.231,21
B	Pertambangan dan Penggalian	63.507.539,51	58.824.076,35	55.844.533,39	52.409.818,04	48.920.117,64
C	Industri Pengolahan	10.198.767,98	10.777.965,24	11.099.978,26	11.849.773,19	13.034.875,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.122,52	13.270,27	13.887,11	16.306,56	17.100,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.950,71	10.119,33	10.408,36	10.559,62	11.563,43
F	Konstruksi	1.654.406,05	1.769.486,45	1.925.919,37	2.037.913,86	2.179.100,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.750.308,58	3.929.206,29	4.003.197,26	4.212.214,88	4.465.445,56
H	Transportasi dan Pergudangan	181.385,15	194.781,18	204.186,61	210.267,05	227.306,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	150.996,95	166.577,45	170.817,69	175.193,88	182.856,93
J	Informasi dan Komunikasi	251.511,84	282.516,00	305.156,39	320.250,30	337.634,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	226.194,54	228.363,66	215.770,85	235.010,10	229.893,91
L	Real Estate	204.568,21	211.277,87	225.155,78	228.475,26	236.064,56
M,N	Jasa Perusahaan	2.164,51	2.402,55	2.608,33	2.766,13	2.985,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	756.011,78	773.095,85	799.409,32	800.801,99	808.558,08
P	Jasa Pendidikan	172.119,13	180.503,13	194.915,90	199.766,11	207.247,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49.016,42	53.118,08	58.434,63	59.743,03	63.218,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	135.619,08	148.490,85	161.547,39	175.372,06	190.235,17
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>88.411.085,59</b>	<b>85.003.796,73</b>	<b>82.676.674,31</b>	<b>80.656.528,98</b>	<b>79.230.434,69</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>33.750.418,34</b>	<b>35.904.336,37</b>	<b>37.076.441,03</b>	<b>38.294.007,47</b>	<b>39.365.937,39</b>

Keterangan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 17. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR  
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.715.859,33	18.288.295,49	20.150.802,19	21.748.873,31	22.834.659,05
B	Pertambangan dan Penggalian	36.589.908,39	42.140.579,19	35.082.761,45	34.936.161,01	33.656.031,01
C	Industri Pengolahan	9.187.091,28	9.983.093,88	10.947.273,38	11.868.195,17	12.918.635,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.064,83	8.239,09	12.050,15	15.508,87	16.761,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.802,11	2.832,06	2.937,56	3.008,13	3.248,78
F	Konstruksi	453.243,24	528.107,69	609.290,28	625.979,96	671.426,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.998.137,12	2.163.000,42	2.332.828,46	2.526.436,13	2.727.630,59
H	Transportasi dan Pergudangan	61.660,48	70.853,17	77.949,15	84.340,19	90.224,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100.546,20	156.837,98	176.040,21	184.115,56	194.445,77
J	Informasi dan Komunikasi	118.350,17	144.621,70	165.399,44	169.534,43	179.706,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	155.968,24	184.699,65	204.042,71	218.394,80	223.034,61
L	Real Estate	176.853,21	194.931,61	216.647,42	231.404,53	239.503,69
M,N	Jasa Perusahaan	111,52	128,31	139,70	146,89	158,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	394.835,49	408.543,27	413.042,55	422.118,61	447.867,85
P	Jasa Pendidikan	121.754,91	134.001,05	152.135,41	166.666,51	175.166,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30.572,78	36.617,06	41.512,35	45.380,41	48.829,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	86.332,75	100.171,29	108.115,87	113.341,09	124.221,83
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>65.200.092,05</b>	<b>74.545.552,92</b>	<b>70.692.968,31</b>	<b>73.359.605,60</b>	<b>74.551.551,53</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>33.893.289,10</b>	<b>39.105.026,31</b>	<b>43.347.057,98</b>	<b>46.728.978,25</b>	<b>48.723.802,42</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 18. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ROKAN HILIR ATAS DASAR  
HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.580.744,00	14.635.014,54	14.772.514,55	15.171.134,64	15.910.482,37
B	Pertambangan dan Penggalian	17.565.397,27	18.123.939,52	17.793.336,08	17.616.990,18	16.906.119,35
C	Industri Pengolahan	7.808.140,18	8.031.975,69	8.343.105,34	8.950.881,05	9.655.267,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.821,67	8.378,51	9.116,17	10.294,65	10.392,92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.655,68	3.680,38	3.696,25	3.687,19	3.712,08
F	Konstruksi	461.359,41	498.648,05	536.229,04	544.603,17	564.045,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.889.062,03	1.993.011,96	2.016.789,44	2.088.252,12	2.228.100,75
H	Transportasi dan Pergudangan	57.439,28	61.523,87	65.863,89	67.574,46	70.949,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73.440,95	79.875,15	83.328,11	85.768,24	87.582,89
J	Informasi dan Komunikasi	113.411,00	124.236,61	134.873,68	138.178,09	139.283,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	125.789,38	141.924,82	151.261,37	155.077,82	157.438,54
L	Real Estate	146.127,30	154.350,73	164.494,44	165.884,42	172.768,62
M,N	Jasa Perusahaan	87,80	92,79	96,64	98,23	103,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	356.676,55	359.327,24	361.411,50	362.662,93	368.102,87
P	Jasa Pendidikan	108.539,96	114.917,81	121.697,91	122.245,56	127.746,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27.358,33	29.300,82	31.702,07	32.478,77	32.868,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	80.013,13	85.583,28	87.289,81	89.439,89	94.685,54
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>42.405.063,91</b>	<b>44.445.781,75</b>	<b>44.676.806,30</b>	<b>45.605.251,42</b>	<b>46.529.651,43</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>29.419.225,97</b>	<b>31.245.830,67</b>	<b>32.012.871,20</b>	<b>33.144.337,43</b>	<b>34.458.369,42</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 19. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.988.554,30	4.758.333,86	5.246.451,32	5.835.992,56	6.184.742,79
B	Pertambangan dan Penggalian	4.406.301,12	4.550.065,43	3.367.127,86	3.162.468,64	3.035.956,76
C	Industri Pengolahan	2.783.903,34	3.223.620,63	3.610.231,06	3.881.126,79	4.152.369,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.922,18	3.163,39	4.567,14	6.436,61	7.185,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	400,04	480,41	599,97	659,94	693,19
F	Konstruksi	445.317,71	616.540,72	655.353,96	711.256,11	767.140,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	754.915,66	1.119.637,18	1.315.668,02	1.438.760,87	1.528.699,34
H	Transportasi dan Pergudangan	249.048,22	308.994,25	347.919,99	368.356,74	387.614,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.917,32	39.352,60	43.941,66	46.951,91	49.106,02
J	Informasi dan Komunikasi	55.705,17	71.893,85	81.786,09	84.604,67	90.185,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	38.234,74	43.313,30	45.451,41	48.236,20	50.256,97
L	Real Estate	43.837,45	53.774,19	62.264,66	68.266,96	72.463,58
M,N	Jasa Perusahaan	320,76	392,56	453,93	510,11	539,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	245.809,97	263.846,56	286.946,81	299.408,24	307.969,26
P	Jasa Pendidikan	22.730,67	27.424,35	32.351,60	36.117,79	37.794,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.802,34	8.508,83	10.714,87	11.130,32	11.565,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	30.243,46	37.781,99	39.805,46	44.148,94	47.138,32
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>13.100.964,46</b>	<b>15.127.124,09</b>	<b>15.151.635,81</b>	<b>16.044.433,42</b>	<b>16.731.422,67</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>8.756.884,95</b>	<b>10.649.889,09</b>	<b>11.857.815,00</b>	<b>12.956.972,97</b>	<b>13.771.568,61</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 20. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.850.191,85	4.103.283,68	4.148.635,85	4.360.280,50	4.550.507,44
B	Pertambangan dan Penggalian	1.945.116,28	1.796.254,98	1.692.463,20	1.616.383,63	1.540.817,38
C	Industri Pengolahan	2.752.799,02	2.952.207,81	3.196.784,14	3.343.697,47	3.517.235,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.066,00	3.216,28	3.498,87	4.282,00	4.412,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	578,41	581,13	595,77	597,22	610,71
F	Konstruksi	348.076,48	409.783,25	427.536,40	448.797,75	474.661,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	756.411,49	803.818,99	866.886,84	902.272,89	947.552,82
H	Transportasi dan Pergudangan	228.034,86	252.632,14	266.653,57	272.974,72	282.095,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.220,32	23.027,51	23.971,06	25.066,45	26.135,75
J	Informasi dan Komunikasi	64.629,61	67.641,35	72.489,40	74.090,76	77.099,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	31.448,33	33.032,13	32.684,54	33.826,82	35.099,99
L	Real Estate	42.451,55	46.271,01	50.764,20	51.775,68	53.273,79
M,N	Jasa Perusahaan	295,27	332,23	367,19	385,66	399,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	232.231,39	239.477,41	253.096,21	254.256,65	256.122,71
P	Jasa Pendidikan	19.969,51	20.976,16	21.827,06	22.683,48	23.480,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.913,04	6.506,37	7.419,50	7.616,06	7.853,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	27.326,76	29.935,02	30.595,53	32.322,93	34.424,22
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>10.329.760,17</b>	<b>10.788.977,45</b>	<b>11.096.269,32</b>	<b>11.451.310,68</b>	<b>11.831.782,17</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>8.433.954,55</b>	<b>9.046.100,32</b>	<b>9.454.281,23</b>	<b>9.884.346,79</b>	<b>10.338.823,75</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 21. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PEKANBARU ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.024.011,56	1.156.508,36	1.341.806,10	1.509.890,71	1.622.018,94
B	Pertambangan dan Penggalian	12.461,14	13.756,95	16.235,74	18.995,70	20.710,19
C	Industri Pengolahan	12.272.526,75	14.013.850,35	16.705.108,57	18.417.242,80	20.113.842,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	97.803,91	119.232,30	148.090,87	183.141,70	205.159,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.496,15	11.977,58	13.351,50	14.293,46	15.539,85
F	Konstruksi	17.893.456,53	22.134.971,85	24.763.478,00	27.433.830,14	30.105.885,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.131.976,82	22.157.999,88	24.520.354,90	27.348.383,98	30.811.637,59
H	Transportasi dan Pergudangan	1.495.872,62	1.793.556,62	2.105.082,78	2.345.294,04	2.572.475,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.266.298,51	1.765.161,45	1.819.509,00	1.941.720,12	2.044.581,21
J	Informasi dan Komunikasi	1.402.089,92	1.583.786,61	1.818.250,09	1.942.350,35	2.089.091,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.236.937,27	2.668.747,22	2.971.439,24	3.286.316,88	3.339.698,20
L	Real Estate	1.759.101,25	2.037.801,22	2.404.177,92	2.588.250,56	2.682.651,89
M,N	Jasa Perusahaan	10.631,63	13.539,02	15.366,32	16.756,37	18.752,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.468.441,48	2.554.745,83	2.751.629,46	2.833.779,37	2.959.044,56
P	Jasa Pendidikan	631.161,71	819.218,58	956.881,02	1.032.542,53	1.116.107,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	266.329,00	329.291,56	408.609,81	447.501,33	487.084,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	511.863,32	667.072,83	904.612,74	1.019.959,84	1.139.578,97
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>60.492.459,55</b>	<b>73.841.218,20</b>	<b>83.663.984,07</b>	<b>92.380.249,90</b>	<b>101.343.860,79</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>60.492.459,55</b>	<b>73.841.218,20</b>	<b>83.663.984,07</b>	<b>92.380.249,90</b>	<b>101.343.860,79</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 22. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PEKANBARU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	838.732,38	873.500,13	900.151,76	935.605,45	974.364,19
B	Pertambangan dan Penggalian	9.692,86	10.040,83	10.275,79	10.525,17	10.784,09
C	Industri Pengolahan	10.856.123,36	11.660.216,32	12.584.636,95	13.449.057,36	14.488.916,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	101.754,48	108.591,26	117.361,16	131.296,46	131.682,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.349,56	11.468,52	11.774,03	11.603,70	11.734,82
F	Konstruksi	13.833.805,06	14.974.548,61	15.977.717,50	17.122.630,88	18.297.243,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.932.338,59	15.765.041,14	16.114.687,35	17.061.111,65	18.157.414,09
H	Transportasi dan Pergudangan	1.282.437,08	1.387.597,96	1.481.825,78	1.536.901,17	1.626.772,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	950.473,77	1.000.056,81	1.005.034,38	1.047.019,68	1.094.729,36
J	Informasi dan Komunikasi	1.509.032,03	1.570.772,39	1.694.228,39	1.780.097,41	1.883.374,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.804.301,15	2.050.690,23	2.187.502,69	2.348.489,64	2.332.813,56
L	Real Estate	1.493.506,46	1.577.683,01	1.711.993,93	1.749.089,43	1.789.843,21
M,N	Jasa Perusahaan	8.663,73	10.424,87	11.129,59	11.508,83	12.403,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.189.348,86	2.230.117,43	2.301.539,40	2.282.241,73	2.302.152,52
P	Jasa Pendidikan	544.852,18	576.025,74	609.550,44	614.294,82	619.700,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227.702,35	249.443,39	276.054,30	287.009,63	308.719,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	459.053,09	519.260,85	621.289,19	668.772,21	726.067,04
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>51.053.167,00</b>	<b>54.575.479,50</b>	<b>57.616.752,66</b>	<b>61.047.255,22</b>	<b>64.768.715,40</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>51.053.167,00</b>	<b>54.575.479,50</b>	<b>57.616.752,66</b>	<b>61.047.255,22</b>	<b>64.768.715,40</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 23. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI ATAS DASAR  
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.290.663,15	1.437.574,71	1.551.170,34	1.687.641,38	1.807.094,41
B	Pertambangan dan Penggalian	93.218,95	108.904,95	120.471,72	121.859,63	116.791,47
C	Industri Pengolahan	10.909.915,76	12.499.495,37	13.544.271,09	15.088.108,05	16.591.040,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.555,57	11.694,09	18.026,24	24.522,43	27.095,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.454,51	3.653,86	4.044,55	4.293,05	4.740,69
F	Konstruksi	2.556.624,71	2.562.176,39	2.869.884,03	3.214.657,79	3.494.631,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.014.813,24	4.589.145,67	4.691.523,15	5.000.294,68	5.250.799,37
H	Transportasi dan Pergudangan	615.012,00	727.106,64	807.763,79	877.796,94	941.565,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	162.081,92	200.381,58	235.071,24	260.520,57	280.817,37
J	Informasi dan Komunikasi	198.535,24	234.989,02	270.710,40	294.246,73	333.681,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	578.397,53	366.129,13	355.025,11	365.887,32	374.027,85
L	Real Estate	100.011,55	113.119,61	127.215,13	134.709,46	143.278,75
M,N	Jasa Perusahaan	1.070,51	1.223,74	1.419,08	1.554,95	1.662,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	474.552,02	494.473,40	524.615,72	541.616,22	552.865,80
P	Jasa Pendidikan	96.837,53	122.921,41	142.978,73	149.543,32	155.246,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.349,65	37.775,23	46.880,43	49.787,22	53.467,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	95.672,32	117.702,05	142.498,86	158.356,28	175.544,37
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>21.231.766,16</b>	<b>23.628.466,85</b>	<b>25.453.569,61</b>	<b>27.975.396,02</b>	<b>30.304.350,75</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>13.523.337,88</b>	<b>14.975.358,52</b>	<b>16.355.311,20</b>	<b>18.327.187,70</b>	<b>20.070.780,24</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 24. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI ATAS DASAR  
HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2017 (JUTA RUPIAH)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.119.969,76	1.138.071,39	1.139.159,31	1.152.198,89	1.190.685,24
B	Pertambangan dan Penggalian	86.479,50	87.258,58	87.421,17	83.885,46	79.731,61
C	Industri Pengolahan	10.414.550,79	11.059.234,35	11.382.355,83	12.032.422,54	12.675.132,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.612,14	13.196,96	14.483,65	17.107,96	17.285,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.363,44	3.428,96	3.523,70	3.517,99	3.679,73
F	Konstruksi	2.181.412,05	2.081.314,46	2.119.777,32	2.184.087,17	2.275.697,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.735.616,92	3.771.270,34	3.776.043,56	3.857.613,26	3.967.113,15
H	Transportasi dan Pergudangan	537.461,38	590.801,20	602.752,39	632.138,13	667.090,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	134.378,76	146.744,72	150.191,31	154.066,50	163.772,54
J	Informasi dan Komunikasi	206.134,11	229.294,86	245.697,40	255.850,29	269.847,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471.332,89	285.154,19	265.536,84	265.883,62	263.892,89
L	Real Estate	86.988,13	90.248,56	94.773,07	96.113,61	99.409,55
M,N	Jasa Perusahaan	883,50	958,60	1.032,15	1.069,38	1.143,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	419.717,32	421.465,77	429.988,77	430.683,13	430.859,42
P	Jasa Pendidikan	82.520,25	89.917,60	94.631,35	95.277,88	97.846,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28.650,41	29.384,74	32.305,65	32.586,29	34.375,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	84.596,52	94.630,46	102.020,06	106.501,69	115.078,72
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>19.605.667,85</b>	<b>20.132.375,72</b>	<b>20.541.693,52</b>	<b>21.401.003,79</b>	<b>22.352.640,53</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>12.096.107,64</b>	<b>12.403.830,85</b>	<b>12.864.614,25</b>	<b>13.660.602,71</b>	<b>14.519.923,53</b>

Keterangan : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI RIAU**

Jalan Pattimura No.12, Pekanbaru 28131  
Telp. (0761) 23042 - 21336, Fax. (0761) 21336  
Homepage://[riau.bps.go.id](http://riau.bps.go.id), Email:[bps1400@bps.go.id](mailto:bps1400@bps.go.id)